

PELAKSANAAN *SMART GOVERNMENT* DI KABUPATEN SOPPENG

Irfan¹, Samsir Rahim², Nasrul Haq³

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

ABSTRACT

Implementation smart government is a smart step for the Soppeng Regency government to consistently improve services using technology. This study aims to find out the implementation of online services and open government in Soppeng Regency. The study design qualitative descriptive analysis method with interactive interviews, and literature studies. The results of the study show that the implementation of smart government uses internet technology for internal use and uses the internet to be accessed by the public. Each SKPD has a website and social media that regulates each SKPD, but it is not yet fully available to the Office of Communication and Information. Online service in the form of services through applications, and integrated numbers for emergencies. Open government through websites and social media. Implementation of smart government in the first year is the procurement of networks to BKD and ASN employee attendance and the establishment of Soppeng Command Center (SCC) and the target for this year will be carried out through the network of districts and public places in the subdistrict.

Keyword: *E-Government, Smart Government, Technology, Information, Soppeng*

ABSTRAK

Pelaksanaan *smart government* merupakan langkah *smart* pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan layanan secara konsisten dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *online service* dan *open government* di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif dengan wawancara interaktif, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *smart government* memanfaatkan teknologi *ethernet* untuk pemakaian internal dan menggunakan internet untuk diakses oleh masyarakat. Setiap SKPD memiliki website dan sosial media yang dikelola masing-masing SKPD, namun belum terintegrasi sepenuhnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika. *Online service* berupa pelayanan melalui aplikasi, dan nomor terpadu untuk kegawatdaruratan. *Open government* melalui website dan sosial media. Pelaksanaan *smart government* pada tahun pertama yaitu pengadaan jaringan ke BKD dan absensi pegawai ASN dan pendirian *Soppeng Command Center* (SCC) serta target untuk tahun kedua ini akan dilakukan perluasan jaringan kantor kecamatan dan tempat umum yang ada di kecamatan.

Kata kunci : *E-Government, Smart Government, Teknologi, Informasi, Soppeng*

PENDAHULUAN

Indikator tingkat kepuasan masyarakat salah satunya adalah efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sehingga menuntut pemerintah untuk berinovasi menerapkan *electronic government* (Tampubolon, 2016).

Masyarakat dapat mengakses beragam informasi dengan mudah dan lebih efisien melalui teknologi yang berbasis aplikasi. Program tersebut adalah bagian dari implementasi *smart city* (Utomo & Hariadi, 2016). *Smart city* didefinisikan sebagai konsep yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efisien dan dapat terciptanya efektifitas interaksi antara pemerintah maupun staff pemerintah dengan warga secara intens. Penerapan teknologi informasi (IT) ini harus tepat sasaran untuk terwujudnya kota yang cerdas.

Sebuah kota dikatakan kota *smart* apabila memenuhi enam dimensi diantaranya *smart people*, *smart mobility*, *smart economy*, *smart government*, *smart living*, dan *smart environment* (UGM, 2016). Implementasi *smart city* di kabupaten Soppeng telah

mencoba untuk merujuk pada salah satu dimensi yaitu pada pelaksanaan *Smart government*.

Hal tersebut dapat dikatakan *e-government* sudah menjadi kebutuhan dengan melihat kondisi perkembangan dalam dunia interaksi sosial yang serba menggunakan Teknologi Informasi. Salah satu tindakan pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan visi dan misinya untuk menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten terbaik adalah salah satunya dengan mewujudkan *smart government* merupakan langkah *smart* pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan layanan secara konsisten dengan mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat di era ini (Eka, 2017).

Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki beberapa kota/kabupaten yang menerapkan *Smart government*, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Soppeng. Hal tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Soppeng no. 15 tahun 2017 Bab V tentang “penyelenggaraan pelayanan publik” bagian tujuh tentang sistem informasi pelayanan publik pasal 34 ayat (2).

Pelaksanaan *smart government* mencoba menerapkan sebuah inovasi pelayanan terpadu yang dinamakan *Soppeng Command Center* (SCC) bertujuan untuk efisiensi pelayanan dengan cara memantau kebutuhan masyarakat secara terpusat. *Soppeng Command Center* (SCC) memiliki beberapa fungsionalitas yang terdiri dari CCTV, *call center* dan kartu macca. Pertama, CCTV merupakan teknologi yang berfungsi untuk monitoring pelayanan masyarakat di instansi atau ruang publik untuk memaksimalkan penilaian kinerja. Kedua, *Call center* adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat pengaduan atau permintaan kebutuhan yang diinginkan yang bersifat *emergency* maupun *non emergency*.

Call center terintegrasi dengan kepolisian, layanan medis atau rumah sakit, maupun pemadam kebakaran. Ketiga, ada Kartu Macca yang digunakan masyarakat untuk melakukan akses sarana kesehatan, akses pendidikan, hukum dan beras sejahtera (Eka, 2017).

Tahun 2015 inovasi pelayanan publik di Kabupaten Soppeng berbasis konsep pelayanan prima yang mengacu pada *standar operating procedure* (SOP). Dengan pelaksanaan yang sesuai SOP

diharapkan berjalan transparan dan pasti (Asriadi, 2015). Pelayanan publik pada saat itu belum menerapkan konsep *e-government*. Sedangkan secara global pada tahun 2015 perkembangan IT sudah sangat cepat serta adanya kanal-kanal aplikasi media sosial yang beraneka macam menjadi salah satu dari beberapa faktor kemajuan perkembangan IT yang tidak dapat dipungkiri.

Pengubahan suatu wilayah menjadi kota cerdas dengan pelaksanaan *smart government* dimulai pada awal tahun Kabupaten Soppeng 2017. Salah satu program yang mendukung pelaksanaan *smart government* adalah dengan diresmikannya Layanan Sistem Informasi dan Data Eletronik Berbasis Android (La Side) pada 30 November 2017 untuk mewujudkan pelayanan transparan, mudah, murah, pasti dan cepat serta terjangkau (Alimuddin, 2017).

Program La Side salah satu dari beberapa konsep *smart government* yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng, dengan harapan dapat mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng yang semakin hari semakin melek teknologi informasi (IT).

Pelaksanaan *smart government* harus melibatkan banyak aspek yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Di Kabupaten Soppeng, pelaksanaan *smart government* belum terorganisir dan berjalan dengan baik dikarenakan masih sangat baru sehingga peneliti berminat melakukan penelitian tentang Pelaksanaan *Smart government* di Kabupaten Soppeng.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah atau *core problems* penelitian masih samar-samar bahkan gelap kompleks dan dinamis. Tipe penelitian ini yaitu fenomenologi yang mana menggambarkan secara sistematis fenomena atau fakta namun tidak menganalisa fenomena itu terjadi.

Penelitian ini berfokus pada penemuan fakta mengenai pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini akan tergambarkan secara sistematis konsep kebijakan pemerintah sebagai *smart government* yakni pelaksanaan *online service*, dan *open government* di Kabupaten Soppeng.

Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti melakukan studi literatur dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian dari berbagai sumber, misalnya: dokumentasi, hasil penelitian sebelumnya (*report*), maupun dari berita aktual (*news*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Smart Government* di Kabupaten Soppeng merupakan program pemerintah dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu pemerintah yang melayani dan lebih baik.

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *online service* dan *open government* pada layanan publik pemerintah kabupaten Soppeng. 1) Pelaksanaan *online service* di Kabupaten Soppeng memanfaatkan teknologi informasi (IT) berupa : a) Pengadaan *call center* untuk pelayanan kegawatdaruratan misalnya : Layanan *Public Safety Center* (PSC) ambulance (Oto Mappajappa). Pemadam kebakaran (Damkar). Layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Soppeng ditempatkan masing-masing satu

pos siaga pada 6 kecamatan guna untuk mempercepat layanan jika terjadi kebakaran dan kemudian di bantu oleh

pemadam pusat yang berada di pusat kota Watansoppeng. Selanjutnya layanan *Call Centre P2TP2A* (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Berikut ini daftar layanan darurat:

No.	Jenis Layanan Darurat	No. Kontak
1.	Layanan kesehatan atau ambulance “Oto Mappajappa” oleh PSC (<i>Publik Safety Centre</i>)	119 atau 0484-119
2.	Layanan pemadam kebakaran untuk Kecamatan Lalabata	Tlp. 0484-23501
3.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Marioriwawo	Hp. 081287727008
4.	Layanan pemadam kebakaran untuk Kecamatan Marioriawa	Hp. 081287727753
5.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Liliriaja	Hp. 085397760924
6.	Layanan pemadam kebakaran untuk Kecamatan Citta	Hp. 085397760925
7.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Lilirilau	Hp. 085397760924
8.	Layanan Pemadam kebakaran untuk Kecamatan Donri-Donri	Hp.-
9.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Ganra	Hp.-
10.	Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Hp. 085242885524

a) Pengadaan aplikasi di beberapa SKPD, untuk diintegrasikan ke runag SCC. b) Layanan perizinan melalui aplikasi “LaSide” oleh DPMPTSP. c) Layanan aplikasi “Tric Soppeng” untuk laporan bencana daerah oleh BPBD Kabupaten Soppeng. d) Website pemerintah Kabupaten Soppeng yang diintegrasikan

dengan laman LPSE untuk pelaksanaan pengadaan daerah secara elektronik.

2) Pelaksanaan *open government* di Kabupaten Soppeng dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Informasi yang dikelola dapat diakses melalui situs website dan beberapa aplikasi. Khusus data dan informasi pemerintah daerah

kabupaten Soppeng dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika.

NO	NAMA SKPD	LINK	STATUS
1.	Sekretariat Daerah	setda.soppengkab.go.id	Tidak aktif
2.	Sekretariat DPRD	dprd-soppengkab.go.id	Tidak aktif
3.	Inspektorat Daerah	inspektorat.soppengkab.go.id	Aktif
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	bpkd.soppengkab.go.id	Aktif
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kesbangpol.soppengkab.go.id	Tidak aktif
6.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.soppengkab.go.id	Aktif
7.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.soppengkab.go.id	Aktif
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.soppengkab.go.id	Tidak aktif
9.	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	dpkp.soppengkab.go.id	Tidak aktif
10.	Dinas Kesehatan	dinkes.soppengkab.go.id	Tidak aktif
11.	Rsud Latemmamala	-	-

12.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dpupr.soppengkab.go.id	Tidak aktif
13.	Dinas Pendidikan	disdik.soppengkab.go.id	Aktif
14.	Dinas Lingkungan Hidup	dinaslh.soppengkab.go.id	Tidak aktif
15.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usahan Kecil Menengah	dppkukm.soppengkab.go.id	Tidak aktif
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	dpmd.soppengkab.go.id	Tidak aktif
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	dppa.soppengkab.go.id	Tidak aktif
18.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	nakertrans.soppengkab.go.id	Aktif
19.	Dinas Pertanian	distan.soppengkab.go.id	Aktif
20.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp.soppengkab.go.id	Aktif

21.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.soppengkab.go.id	Aktif
22.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	satpolpp.soppengkab.go.id	Tidak aktif
23.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Perumahan	dppk.soppengkab.go.id	Tidak aktif
24.	Dinas Perhubungan	dishub.soppengkab.go.id	Tidak aktif
25.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	dppkb.soppengkab.go.id	Tidak aktif
26.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	dispورا.soppengkab.go.id	Tidak aktif
27.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	dpk.soppengkab.go.id	Tidak aktif
28.	Dinas Sosial	dinsos.soppengkab.go.id dan dinsoskabsoppeng.blogspot.com	Tidak aktif Aktif
29.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	disbudpar.soppengkab.go.id	Tidak aktif
30.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	diskominfo.soppengkab.go.id dan ppid.soppengkab.go.id	Aktif Aktif
31.	Kecamatan Ganra	ganra.soppengkab.go.id	Aktif

32.	Kecamatan Lilirilau	lilirilau.soppengkab.go.id	Aktif
33.	Kecamatan Marioriawa	marioriawa.soppengkab.go.id	Aktif
34.	Kecamatan Lalabata	lalabata.soppengkab.go.id	Aktif
35.	Kecamatan Marioriwawo	marioriwawo.soppengkab.go.id	Aktif
36.	Kecamatan Donri- Donri	donridonri.soppengkab.go.id	Aktif
37.	Kecamatan Liliriaja	liliriaja.soppengkab.go.id	Aktif
38.	Kecamatan Citta	citta.soppengkab.go.id	Aktif

Sistem pengawasan kinerja dan pemantauan ruang-ruang publik menggunakan teknologi CCTV yang diintegrsikan melalui satu ruangan kendali, *Soppeng Command Centre* (SCC) berada langsung diruang kerja Bupati Kabupaten Soppeng. *Soppeng Command Centre* (SCC) adalah ruang kendali yang berada langsung pada ruang kerja Bupati Soppeng berfungsi sebagai pusat kendali informasi dan pemantauan yang terintegrasi dengan semua SKPD pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pengelolaan data dan informasi oleh SKPD, dilakukan dengan tetap

berkoordinasi dengan dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana sistem *E-Government* Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pelaksanaan sistem *E-government* pemerintah Kabupaten Soppeng dilakukan dengan tiga tahap pengadaan. Pada tahun pertama tahap pengadaan infrastruktur jaringan, pengadaan 16 titik pantau CCTV yang terhubung di SCC dan pengadaan jaringan ke BPKD untuk pemantauan absensi pegawai, yang kedua pengintegrasian dengan beberapa SKPD pelayanan utama dan ruang publik, dan yang ketiga pengadaan jaringan dan

pengintegrasian seluruh Kecamatan di Kabupaten Soppeng.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan *online service* di Kabupaten Soppeng memanfaatkan teknologi informasi (IT) berupa *call center*, *website*, integrasi beberapa SKPD ke SCC.

Pelaksanaan *open government* diantaranya: pengadaan 16 titik pantau CCTV yang terhubung di SCC dan pengadaan jaringan ke BPKD untuk pemantauan absensi pegawai, yang kedua pengintegrasian dengan beberapa SKPD pelayanan utama dan ruang publik, dan yang ketiga pengadaan jaringan dan pengintegrasian seluruh Kecamatan di Kabupaten Soppeng.

Pengelolaan data dan informasi oleh SKPD, dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana sistem *e-government* Pemerintah Kabupaten Soppeng

SARAN

Diharapkan pelaksanaan *open government* di setiap SKPD dapat terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng sehingga publikasi data dari seluruh SKPD dan Pemerintah Daerah Soppeng berpusat disatu website, aplikasi atau akun sosial media yang dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.

Diharapkan bagi pemerintah terkait untuk mengembangkan program yang dicanangkan mengenai pelaksanaan *online service* di Kabupaten Soppeng sampai ke daerah-daerah atau pelosok yang masih belum tersentuh teknologi. Sehingga setiap SKPD untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam melayani masyarakat dalam kaitannya memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi sebagai inovasi pelayanan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin. (2017). *Launching LaSide, DPM PTSP Soppeng Gelar Sosialisasi Pelayanan Publik*. Soppeng: La Temmamala News.

- Arsana, I. P. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asriadi. (2015). *Inovasi Andi Soetomo, Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan*. Soppeng: Jawa Pos.
- Eka, R. (2017, Oktober 9). *Implementasi Riil Smart City Tidak Hanya untuk Kota Besar, Kabupaten Soppeng di Sulawesi Selatan Membuktikannya*.
- Enceng, & Hidayat, A. (2016). Peningkatan Layanan Publik melalui *Smart government* and *Smart Mobility*. *Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016, hlm. 87-156*, 87-156.
- Esabella, S. (2016, Februari 6). *Menuju Konsep Smart City*. Retrieved Oktober 31, 2017, from Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa – sesabella@gmail.com
- Fitriani.B. (2014). *Efektivitas e-service (pelayanan on-line) di Pemerintah Daerah*. Dipetik April 10, 2018, dari ebook.repo.mercubuana-yogya.ac.id
- Habibie, B. J. (2016). *Melesat atau Kandas? New Indonesia dari Smart City menuju Smart Nation*. Jakarta: PT Elex Media Komputer
- Hartina. (2017). *Smart Governance (Studi Kasus Pada Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bone*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hendraningrat, D. K., & Setiawan, D. (2017). *Roadmap Broadband Indonesia menuju Era Teknologi 5G*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Machfoedz, I. (2014). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif)*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14 No. 1 Juni 2017*, 126-138.
- Perda. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik*. Dipetik April 7, 2018, dari <http://jdih.soppengkab.go.id>
- Pongsapan, F. P., Rindengan, Y. D., & Najoran, X. B. (2014). Desain Arsitektur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Manado Smart city; Studi Kasus Pemerintah Kota Manado. *e-journal Teknik Elektro dan Komputer (2014), ISSN: 2301-8402*, 1-7.
- Perda. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik*. Dipetik April 7, 2018, dari <http://jdih.soppengkab.go.id>
- PP. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2017 tentang inovasi daerah*. Dipetik April 7, 2018, dari <http://setkab.go.id>

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12*, 1-12.
- Rizka, O. (2017). *Implementasi Smart City di Kota Malang*. Malang: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Sakti, S. P. (2017). *Pengantar Teknologi Sensor*. Malang: UB Press.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Saputra, P. (Director). (2017). *Soppeng Command Center (SCC)* [Motion Picture].
- Scassa, T. (2014, Juni 2). Privacy and Open Government. *Future Internet 2014*, 6(2), doi:10.3390/fi6020397, hal. Future Internet 2014, 6(2), 397-413; doi:10.3390/fi6020397.
- Sucoko, B. M. (2007). *Manajemen Administrasi Perkatoran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukwiat, Jamal, S., & Sukamto, S. (2006). *Ekonomi*. Aceh: Yudistira.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Supangkat, S. H. (2015). *Smart City Invitiatives*. Retrieved Oktober 10, 2017, from Smart City Invitiatives: www.un.org
- Tampubolon, L. P. (2016). Pemingkatan *E-government* Indonesia (PEGI) dan Pemanfaatan Teknologi Informais di DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, VOL. 8, NO. 2, Oktober 2016, 1121-1132.
- UGM, P. (2016). Road Map Kota Yogyakarta menuju Smart City. *Working Paper PSPPR*, 1-27.
- Utomo, C. E., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi dan Bisnis Vol. 4, No. 2*, 159-175.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widayat, A. P., Munandar, M. A., & Sumarto, S. (2017). Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dengan Aplikasi Quick Response dan WEB Di Kantor Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal Vol. 1, No. 2, January 2017*, 98-106.
- Yuhefizar. (2008). *10 Jam Menguasai internet : Teknologi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.